

KOP SURAT

INDIKATOR KOMPONEN OTONOMI DAERAH

| No | Tahun | Indikator | Definisi Operasional | Rumus | Capaian | Bukti Dukung | Keterangan |
|----|-------|---|---|---|---------|--|--------------|
| 1 | 2025 | Indeks Kepatuhan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (indikator untuk Provinsi) | memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukannya, kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3848 Tahun | Skala indeks kepatuhan daerah = | | Screenshot hasil penilaian Indeks kepatuhan daerah (E-Perda) | BAGIAN HUKUM |
| 2 | 2025 | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N | | Tepat atau Tidak Tepat | | | BAGIAN HUKUM |
| 3 | 2025 | Persentase Penetapan RanPerda Tahun N | | Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N = Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N = <div>..... ----- x 100%</div> | | | BAGIAN HUKUM |
| 4 | 2025 | Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PTUN Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) | Pemerintah Daerah melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat, dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum | YA/TIDAK | | Putusan pengadilan dan surat keputusan kepala daerah | BAGIAN HUKUM |

| | | | | | | | |
|---|------|---|---|----------|-------|---|--------------|
| 5 | 2025 | Kepatuhan Pemda dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah. (PP 18/2016; PP 72/2019; PP 106/2021; beserta peraturan dibawahnya) | <p>Pemerintah Daerah telah</p> <p>a. Perda (pembentukan dan susunan perangkat daerah) (pasal 3 ayat 1 PP 18/2016).</p> <p>b. Perkada (kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah) terkait kelembagaan perangkat</p> | YA/TIDAK | | Copy halaman depan, belakang serta pasal yang menunjukan bunyi peraturan Perda dan perkada yang diterbitkan | BAGIAN HUKUM |
|---|------|---|---|----------|-------|---|--------------|

Muara Bungo, 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUNGO

.....
NIP.

KOP SURAT

INDIKATOR KOMPONEN OTONOMI DAERAH

| No | Tahun | Indikator | Definisi Operasional | Rumus | Capaian | Bukti Dukung | Keterangan |
|----|-------|---|---|--|---------|--------------|---------------------------------|
| 1. | 2025 | Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan) | Pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi menteri dalam negeri persetujuan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Data Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait penyederhanaan struktur organisasi 2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait penyetaraan jabatan | Jumlah tindakanj kepatuhan pemda = Jumlah rekomendasi Mendagri = <div>..... ----- x 100%</div> | | | SETDA (BAGIAN ORGANISASI) |
| 2. | 2025 | Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N | | Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N = | | | SETDA (BAGIAN ORGANISASI) |
| 3. | 2025 | Keberadaan Mall Pelayanan Publik | | Ada atau Tidak | | | SETDA (BAGIAN ORGANISASI) |

Muara Bungo,

2026

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN BUNGO

.....
NIP.

KOP SURAT

INDIKATOR KOMPONEN OTONOMI DAERAH

| No | Tahun | Indikator | Definisi Operasional | Rumus | Capaian | Bukti Dukung | Keterangan |
|----|-------|--|---|--|---------|---|------------|
| 1 | 2025 | Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD | Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD | Tepat Waktu /Tidak Tepat Waktu | | Untuk penyampaian LKPJ melampirkan Surat Pengantar Penyampaian LKPJ kepada DPRD dan Tanda Terima | BAPPEDA |
| 2 | 2025 | Ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan LKPJ oleh DPRD | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembahasan LKPJ oleh DPRD | Tepat Waktu /Tidak Tepat Waktu 1. Undangan Pembahasan LKPJ : Ada / Tidak Ada 2. Risalah Rapat : Ada/Tidak Ada 3. Berita Acara : Ada/Tidak Ada 4. Keputusan DPRD tentang Rekomendasi : Ada/Tidak Ada 5. Dokumentasi: Ada/Tidak Ada | | Untuk Pembahasan LKPJ melampirkan Undangan Pembahasan LKPJ, Risalah - Rapat, Berita Acara, Keputusan DPRD tentang Rekomendasi dan Dokumentasi | BAPPEDA |
| 3 | 2025 | Penyampaian rekomendasi LKPJ provinsi kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri | Penyampaian Rekomendasi LKPJ Provinsi kepada Gubernur dan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri | Ada/Tidak Ada | | Untuk Penyampaian Rekomendasi LKPJ Provinsi kepada Gubernur dan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melampirkan Surat pengantar dan Tanda Terima | BAPPEDA |
| 4 | 2025 | Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri | Penyampaian Rekomendasi LKPJ -Kab/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri | Ada/Tidak Ada | | Untuk Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kab/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melampirkan Surat pengantar dan Tanda Terima | BAPPEDA |

| | | | | | | | |
|---|------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|
| 5 | 2025 | Jumlah Program yang | Program-Program yang | Jumlah Program yang | | | |
|---|------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|-------|--|---------|
| | | Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Perpres No 52 Tahun 2023 | Mendukung 7 Program Prioritas Nasional | Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Perpres No 52 Tahun 2023 = = <div> <div>.....</div> <div>.....</div> </div> x 100% | | | BAPPEDA |
| 6 | 2025 | Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 38/2017) | | Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat) | | | BAPPEDA |

Muara Bungo, 2026

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BUNGO

.....
NIP.

KOP SURAT

INDIKATOR KOMPONEN OTONOMI DAERAH

| No | Tahun | Indikator | Definisi Operasional | Rumus | Capaian | Bukti Dukung | Keterangan |
|----|-------|---|----------------------|---|---------|--------------|------------|
| 1. | 2025 | Persentase Jabatan Struktural yang Terisi | | Jabatan Struktural yang terisi (Definitf) = Jabatan Struktural yang ada = $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ | | | BKPSDMD |
| 2. | 2025 | Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun N | | Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional = Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional = $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ | | | BKPSDMD |

Muara Bungo,

2026

KEPALA BKPSDMD
KABUPATEN BUNGO

.....
NIP.